

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memaparkan informasi bahwa peneliti tidak menjadi plagiat dalam pembuatan karya ilmiah ini. Selain itu, kajian pustaka juga digunakan sebagai pembanding untuk menemukan perbedaan dari isi keseluruhan karya ilmiah, dengan penelitian sebelumnya.

2.1.1. Inflasi

2.1.1.1. Pengertian Inflasi

Boediono (2011:155) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Menurut Nanga (2000:241), setidaknya ada tiga hal yang perlu ditekankan dalam memahami inflasi, yaitu:

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu naik atau turun, tetapi tetap menunjukkan tendensi atau kecenderungan yang meningkat.
2. Kenaikan tingkat harga tersebut terjadi secara terus-menerus (*sustained*), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, tetapi beberapa waktu lamanya. Kenaikan harga yang sifatnya sementara seperti pada saat momen-momen tertentu seperti hari raya tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.
3. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga umum, bukan hanya satu atau beberapa komoditas saja. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja

tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan harga itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.

Keynes dalam (Boediono, 2011) menyatakan bahwa inflasi terjadi disebabkan masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Inflasi terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar. Oleh karena itu, solusi yang harus diambil adalah dengan jalan mengurangi jumlah pengeluaran agregat itu sendiri (mengurangi pengeluaran pemerintah atau dengan meningkatkan pajak dan kebijakan uang ketat. Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi inflationary gap. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Karenanya teori ini dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.

Menurut teori kuantitas dalam (Boediono, 2011), pada prinsipnya mengatakan bahwa timbulnya inflasi itu hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang yang beredar dan bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan teori ini ada 2 faktor yang menyebabkan inflasi.

1. Jumlah uang yang beredar.

Semakin besar jumlah uang yang beredar dalam masyarakat maka inflasi juga akan meningkat. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah harus memperhitungkan

atau memperkirakan akan timbulnya inflasi yang bakal terjadi bila ingin mengadakan penambahan pencetakan uang baru, karena pencetakan uang baru yang terlalu besar akan mengakibatkan goncangnya perekonomian.

2. Perkiraan atau anggapan masyarakat bahwa harga-harga akan naik.

Jika masyarakat beranggapan harga-harga akan naik maka tidak ada kecenderungan untuk menyimpan uang tunai lagi, masyarakat akan menyimpan uang mereka dalam bentuk barang sehingga permintaan akan mengalami peningkatan. Hal ini mendorong naiknya harga secara terus-menerus.

Menurut teori strukturalis dalam (Boediono, 2011) teori Strukturalis disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang karena menyoroti sebab inflasi yang berasal dari struktur ekonomi, khususnya supply bahan makanan dan barang ekspor. Pertambahan produksi barang tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, akibatnya terjadi kenaikan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Selanjutnya adalah kenaikan harga barang yang merata sehingga terjadi inflasi. Inflasi semacam ini tidak bisa diatasi hanya dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, tetapi harus diatasi dengan peningkatan produktivitas dan pembangunan sektor bahan makanan dan barang-barang ekspor.

Menurut Bank Indonesia (2023) secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi.

Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output riil* yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari komdisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

2.1.1.2. Jenis-Jenis Inflasi

Menurut Boediono (2011) berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu sebagai berikut:

1. Inflasi merayap (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
2. Inflasi menengah (*galloping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 10% - 30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi dua digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya.
3. Inflasi tinggi (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya 30% - 100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga harga berubah.
4. Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang di tandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilainya merosot tajam sehingga lebih baik di tukar dengan barang.

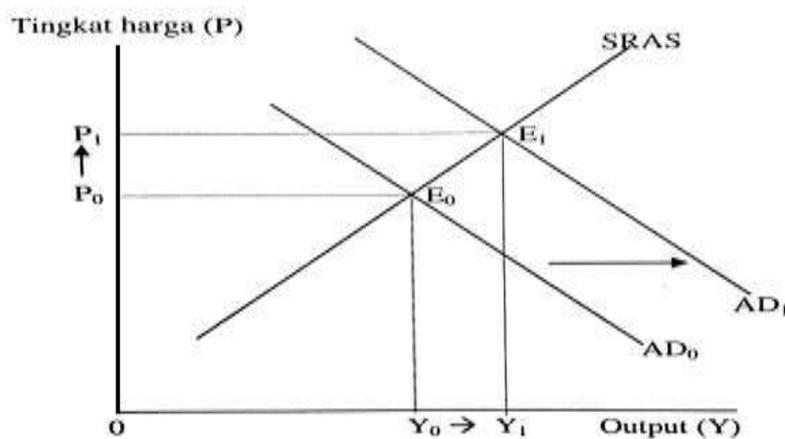
Sedangkan jenis inflasi berdasarkan sebabnya, dapat dibagi dengan dua kriteria yaitu:

1. *Demand pull inflation*

Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi disatu pihak dan kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*) di pihak lain. Sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak dan penawaran kerja tetap, harga akan naik. Bila hal ini langsung secara

terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

Salah satu guncangan utama terhadap inflasi adalah perubahan pada permintaan agregat. Perubahan pada jumlah uang yang beredar, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor netto dapat mengubah permintaan agregat dan mendorong output yang lebih besar dari potensinya. Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian (Samuelson, *et. al.*,1992:324).



Sumber: (Nanga, M., 2001:250)

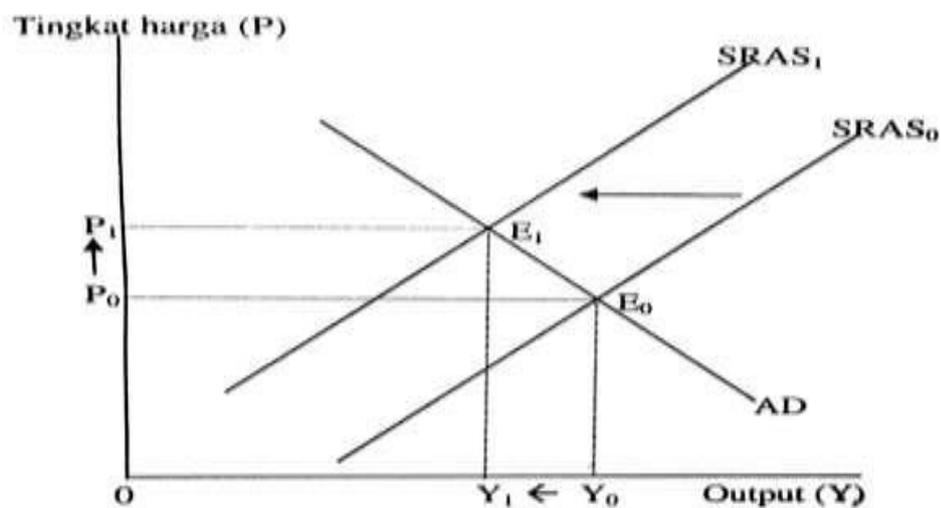
Gambar 2.1 Demand-Pull Inflation

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa perekonomian mula-mula berada pada titik E_0 . Dengan kenaikan permintaan agregat (AD) dari AD_0 ke AD_1 , menyebabkan tingkat harga naik dari P_0 ke P_1 , dan pada saat yang sama perekonomian akan bergerak sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS) dari titik E_0 ke E_1 . Dalam jangka pendek output (Y) naik dari

Y_0 ke Y_1 .

2. *Cost push inflation*

Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya). Inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*) merupakan inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi supply barang dan jasa ke pasar. Dengan perkataan lain, inflasi sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya pembatasan terhadap penawaran dari satu atau lebih sumberdaya, atau inflasi yang terjadi apabila harga dari satu atau lebih sumberdaya mengalami kenaikan atau dinaikan.



Sumber: (Nanga, M., 2001:250)

Gambar 2.2 *Cost-Push Inflation*

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mula-mula berada di titik E_0 . kemudian dengan adanya kenaikan biaya produksi yang menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS) bergeser sepanjang kurva permintaan agregat (AD), yaitu dari $SRAS_0$ ke $SRAS_1$, telah mendorong perekonomian bergerak dari titik E_0 ke E_1 . Akibatnya, harga naik dari P_0 ke P_1 , dan sebaliknya output (Y) turun dari Y_0 ke Y_1 .

Selanjutnya inflasi berdasarkan asalnya, yaitu:

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*).

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaranbelanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen gagal dan sebagainya.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini dapat mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka. Penularan inflasi ini dapat terjadi melalui kenaikan harga baik itu impor maupun ekspor baik secara *demand inflation* maupun *cost inflation*.

2.1.2. Subsidi

2.1.2.1. Pengertian dan Jenis Subsidi

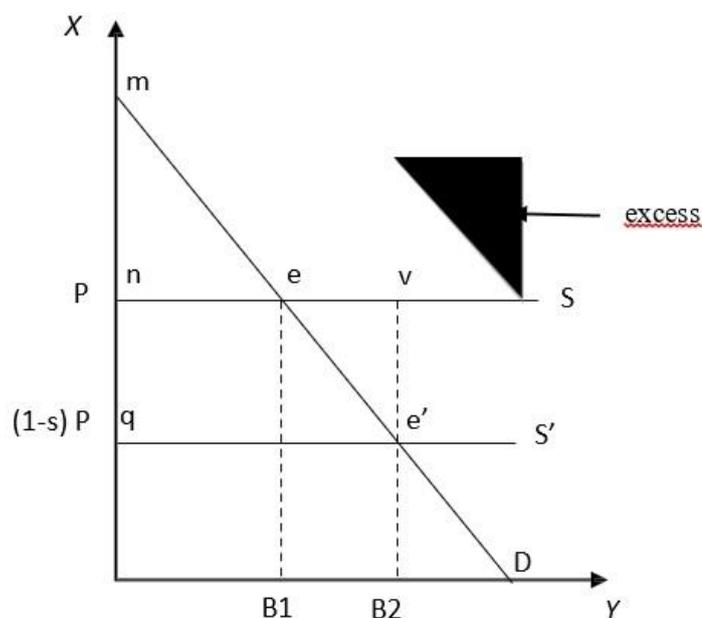
Subsidi yaitu transfer pemerintah pusat ke daerah yang merupakan bagian dari pusat ke daerah yang merupakan bagian dari pengeluaran rutin atau pengeluaran lainnya, yaitu pengeluaran negara dalam upaya pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Suparmoko (2003 : 38-40) pemberian subsidi dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

1. Subsidi Dalam Bentuk Uang (Pendapatan)

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang.

2. Subsidi In Natura (Harga)

Subsidi barang dengan jumlah tertentu terjadi apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan pembayaran tetapi dibawah harga pasar.



Sumber: (Suparmoko, 2003:38-40)

Gambar 2.3 Kurva Ilustrasi Kebijakan Subsidi (In Natura)

Dari Gambar 2.3 diasumsikan bahwa permintaan suatu barang mengikuti garis permintaan D. Penawarannya diasumsikan elastisitas sempurna mengikuti garis horisontal S. Dengan kurva penawaran S dan kurva permintaan D, menghasilkan tingkat keseimbangan yang berarti bahwa dengan tingkat harga P

maka kuantitas barang yang diminta sebesar B_1 .

Misalkan harga suatu barang di pasaran dianggap terlalu mahal oleh pemerintah, maka pemerintah memberikan subsidi terhadap suatu barang tersebut agar seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tergolong miskin dapat memenuhi kebutuhannya. Subsidi yang dilakukan pemerintah tersebut menyebabkan kurva penawaran S bergeser kebawah menjadi S' dan harga barang tersebut turun menjadi $(1-s)P$. Jika tujuan pemerintah melakukan subsidi adalah meningkatkan jumlah konsumsi maka program tersebut telah sukses dilakukan. Namun jika tujuan kebijakan adalah memaksimalkan kemakmuran, maka program tersebut harus dilihat lebih komprehensif lagi. Sebelum diberi subsidi surplus konsumen sebesar " $m - n - e$ " dan setelah diberi subsidi menjadi " $m - q - e$ ". Manfaat yang diterima konsumen sebesar " $e - v - e$ ". (*Guritno, 2000:2.*)

Pengaruh subsidi barang (In Natura) dengan jumlah tertentu bisa mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah pembelian untuk barang-barang yang disubsidikan tetapi konsumsi total bertambah.
2. Tidak mengubah konsumsi total
3. Konsumsi menjadi terlalu tinggi
4. Konsumsi menjadi terlalu rendah

Bila dua jenis subsidi di atas dibandingkan, bisa dilihat bahwa pemberian subsidi dalam bentuk uang jauh lebih efisien dibandingkan dengan subsidi barang. Hal itu dikarenakan:

1. Kepuasan yang diperoleh masyarakat bisa lebih maksimum karena dengan

adanya subsidi tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta tidak membatasi pilihan masyarakat atau konsumen akan suatu barang.

2. Jumlah anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi uang tersebut jauh lebih kecil ketimbang subsidi barang.

2.1.2.2. Pengertian Subsidi Bahan Bakar Minyak

Menurut Daryanto (2007) BBM (bahan bakar minyak) adalah senyawa hidrokarbon yang dibentuk dari proses yang berlangsung dalam skala waktu geologis. Bahan bakar minyak sendiri merupakan hasil pengilangan dari minyak bumi (minyak mentah) yang telah melalui proses pemurnian dan perubahan struktur serta komposisinya. Proses pemurnian dan perubahan struktur serta komposisinya berlangsung di kilang minyak yang merupakan tempat pengolahan sekaligus distribusi awal BBM. BBM digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor terutama untuk jenis premium, pertamax, dan solar. Namun adapula yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti LPG dan minyak tanah.

Menurut Daryanto (2007) Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. BBM bersubsidi merupakan selisih negatif antara hasil penjualan BBM dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan distribusi BBM dalam negeri.

Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis,

standar, dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu. Subsidi jenis BBM tertentu perliter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dengan harga jual eceran netto (tidak termasuk pajak) yang dihitung berdasarkan harga patokan penyediaan BBM bersubsidi sesuai dengan harga indeks pasar di kawasan Asia Tenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian BBM bersubsidi ke seluruh NKRI. (Daryanto, 2007)

2.1.3. Kurs

2.1.3.1. Pengertian Kurs

Definisi kurs valas menurut Sadono Sukirno (2000:397), adalah : “Harga atau nilai dari satu mata uang yang dinyatakan dalam ukuran mata uang negara lain”. Dapat juga didefinisikan sebagai “jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan nilai kurs rupiah adalah harga mata uang rupiah terhadap satu mata uang lainnya. Apabila kita membahas tentang kurs, maka paling sedikit ada dua jenis mata uang yang diperbandingkan.

Ekonom membedakan kurs menjadi 2: kurs nominal dan kurs riil. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Contoh: jika kurs antara dolar AS dan rupiah Indonesia adalah 10.000 rupiah per dolar, maka 1 dolar dapat ditukarkan dengan 10.000 rupiah di pasar uang. Sedangkan kurs riil adalah harga

relatif dari barang-barang antara dua negara. Kurs riil menyatakan tingkat dimana barang-barang dari suatu negara bisa diperdagangkan untuk barang-barang dari negara lain. Kurs riil kadang disebut *terms of trade*. Kurs riil antara dua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua negara. Jika kurs riil tinggi, barang-barang luar negeri relatif lebih mahal dan barang-barang domestik relatif lebih murah (Mankiw, 2003:125).

Besar kecilnya kurs tergantung dari kuatnya permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan terhadap mata uang asing (dalam hal ini permintaan terhadap dollar Amerika), maka kurs rupiah akan semakin meningkat yang berarti nilai rupiah semakin menurun. Sebaliknya semakin berkurang permintaan terhadap dollar Amerika, maka kurs rupiah semakin turun (menguat), yang berarti nilai rupiah mengalami kenaikan. Misal: impor dari luar negeri menyebabkan permintaan valuta asing meningkat dan dapat melemahkan nilai tukar negara yang bersangkutan, dan sebaliknya ekspor dapat menyebabkan penawaran valuta asing meningkat dan dapat memperkuat nilai tukar negara yang bersangkutan.

Jadi nilai tukar dapat berubah-ubah, dapat terjadi depresiasi atau apresiasi. Depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar AS artinya suatu penurunan harga rupiah terhadap dollar. Depresiasi membuat harga barang-barang domestik menjadi lebih murah bagi pihak luar negeri. Sedangkan apresiasi rupiah terhadap dollar AS adalah kenaikan harga rupiah terhadap dollar AS. Apresiasi mata uang suatu negara membuat harga barang-barang domestik menjadi lebih mahal bagi pihak luar negeri.

2.1.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs

Apabila kurs valuta asing sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar,

maka kurs valuta asing itu akan senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Menurut Sukirno (1997:362), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar, yaitu :

1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat

Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan. Apabila penduduk suatu negara semakin lebih menyukai barang-barang dari satu negara lain (dengan kata lain lebih menyukai impor), maka permintaan mata uang negara lain tersebut bertambah. Maka perubahan seperti itu mempunyai kecenderungan untuk menaikkan nilai mata uang negara lain tersebut.

2. Perubahan harga dari barang-barang ekspor

Apabila harga barang-barang ekspor mengalami perubahan maka perubahan ini akan mempengaruhi permintaan barang ekspor itu. Perubahan ini selanjutnya akan mempengaruhi kurs valuta asing. Kenaikan harga barang-barang ekspor akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut di luar negeri. Maka kenaikan tersebut akan mengurangi penawaran mata uang asing. Kekurangan penawaran mata uang asing ini akan menjatuhkan nilai uang dari negara yang mengalami kenaikan dalam harga-harga barang ekspornya.

3. Kenaikan harga-harga umum (Inflasi)

Berlakunya inflasi di suatu negara dapat menurunkan nilai mata uangnya. Di satu sisi kenaikan harga-harga itu akan menyebabkan penduduk negara itu semakin banyak mengimpor dari negara lain. Oleh karenanya permintaan terhadap valuta asing bertambah. Di sisi lain ekspor negara itu bertambah mahal dan ini akan mengurangi permintaannya dan selanjutnya akan

menurunkan penawaran valuta asing.

4. Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi

Disamping dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran ke atas barang-barang yang diperdagangkan di antara berbagai negara, kurs valuta asing dipengaruhi pula oleh aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta arah aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik akan mendorong pemasukan modal ke negara tersebut. Selanjutnya penawaran valuta asing yang bertambah ini akan meninggikan nilai mata uang negara yang menerima modal tersebut.

5. Perkembangan Ekonomi

Bentuk dari pengaruh perkembangan ekonomi pada kurs valuta asing tergantung kepada corak dari perkembangan ekonomi itu. Apabila disebabkan oleh perkembangan sektor ekspor, penawaran mata uang asing akan terus menerus bertambah. Dalam keadaan seperti ini perkembangan ekonomi akan meninggikan nilai mata uang. Tetapi apabila sumber perkembangan ekonomi itu adalah dari perluasan kegiatan ekonomi di luar sektor ekspor, perkembangan itu berkecenderungan akan menurunkan nilai mata uang asing. Akibat yang demikian akan timbul karena pendapatan yang bertambah akan menaikkan impor. Kenaikan impor ini akan menaikkan permintaan ke atas valuta asing.

2.1.3.3.Sistem Nilai Tukar

Sistem nilai tukar sangat tergantung pada kebijakan moneter suatu negara. Bentuk sistem nilai tukar dapat dibagi dalam dua bentuk (Berlianta, 2004), yaitu :

1. *Fixed Exchange Rate System*

Merupakan suatu sistem nilai tukar dimana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Sistem ini mulai diterapkan pada pasca perang dunia kedua yang ditandai dengan digelarnya konferensi mengenai sistem nilai tukar yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944.

2. *Floating Exchange Rate System*

Setelah runtuhnya Fixed Exchange Rate System maka timbul konsep baru yaitu Floating Exchange Rate System. Dalam konsep ini nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang.

Fakta yang terjadi di banyak negara di dunia menganut varians dari kedua sistem pokok nilai tukar diatas. Menurut Gilis (1996), dalam Abimayu (2004:8- 10), terdapat enam sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya intervensi dan cadangan devisa yang dimiliki bank sentral suatu negara yang dipakai oleh banyak negara di dunia antara lain:

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (*fixed exchange rate*)

Dalam sistem ini otoritas moneter selalu mengintervensi pasar untuk

mempertahankan nilai tukar mata uang sendiri terhadap satu mata uang asing tertentu. Intervensi tersebut memerlukan cadangan devisa yang relatif besar. Tekanan terhadap nilai tukar valuta asing, yang biasanya bersumber dari defisit neraca perdagangan, cenderung menghasilkan kebijakan devaluasi.

2. Sistem Nilai Mengambang Bebas (*free floating exchange rate*)

Sistem ini berada pada kutub yang bertentangan dengan sistem *fixed*. Dalam sistem ini, otoritas moneter secara teoritis tidak perlu mengintervensi pasar sehingga sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar. Sistem ini berlaku di Indonesia saat ini.

3. Sistem *Wider Band*

Pada sistem tersebut nilai tukar dibiarkan mengambang atau berfluktuasi diantara dua titik, tertinggi dan terendah. Apabila keadaan perekonomian mengakibatkan nilai tukar bergerak melampaui batas tertinggi dan terendah tersebut, maka otoritas moneter akan melaksanakan intervensi dengan cara membeli atau menjual rupiah sehingga nilai tukar rupiah berada diantara kedua titik yang telah ditentukan.

4. Sistem Mengambang Terkendali (*Managed Float*)

Dalam sistem ini, otoritas moneter tidak menentukan untuk mempertahankan satu nilai tukar tertentu. Namun, otoritas moneter secara kontinyu melaksanakan intervensi berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya cadangan devisa yang menipis. Untuk mendorong ekspor, otoritas moneter akan melakukan intervensi agar nilai mata uang menguat.

5. Sistem *Crawling Peg*

Otoritas moneter dalam sistem ini mengaitkan mata uang domestik dengan beberapa mata uang asing. Nilai tukar tersebut secara periodik dirubah secara berangsur-angsur dalam persentase yang kecil. Sistem ini dipakai di Indonesia pada periode 1988-1995.

6. Sistem *Adjustable Peg*

Dalam sistem ini, otoritas moneter selain berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar juga berhak untuk merubah nilai tukar apabila terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi.

2.1.3.4. Perkembangan Sistem Nilai Tukar di Indonesia

Dalam sejarah perekonomian Indonesia sistem nilai tukar di Indonesia pada intinya dikelompokkan menjadi empat bagian. Penetapan sistem nilai tukar oleh Bank Indonesia didasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Perry dan Solikin (2003) memaparkan sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

1. Sistem Nilai Tukar Bertingkat (*Multiple Exchange Rate System*)

Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga Juli 1971. Penggunaan sistem ini dilakukan dalam rangka menghadapi berfluktuasinya nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi dua digit selama periode tersebut.

2. Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchange Rate System*)

Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971 hingga Oktober 1978 ini mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika Serikat

yaitu tarif US\$1 =Rp415,00. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun waktu 1971-1978. Neraca pembayaran tersebut kuat karena sektor migas mempunyai peran besar dalam penerimaan devisa ekspor yang didukung oleh peningkatan harga minyak mentah (masa keemasan minyak).

3. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchange Rate*)

Sistem ini berlaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada masa ini nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing (*basket currency*). Pada periode ini telah terjadi tiga kali devaluasi yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah devaluasi tahun 1986, nilai nominal rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilai tukar riil yang lebih baik. Pada sistem ini, nilai tukar dibagi dalam tiga periode yaitu:

- a. Managed Floating I (1978-1986), terjadi fluktuasi nilai tukar yang tidak terlalu besar dengan nilai kurs berkisar antara Rp625,38 hingga Rp1.644,10. Periode tersebut lebih didominasi oleh ketidakpastian manajemen dari Bank Indonesia dibandingkan ketidakpastian *floating* karena situasi perekonomian pada saat tersebut belum berkembang. Hal ini dapat dilihat oleh adanya pergerakan nilai tukar nominal yang relatif tetap dan perubahan relatif baru terjadi pada tahun-tahun dimana Indonesia melakukan devaluasi rupiah.

- b. *Managed Floating II* (1987-1992). Pada periode ini juga terjadi devaluasi walaupun tidak terlalu besar dengan nilai kurs antara Rp1.644,10 hingga Rp2.053,40. Namun pada periode ini, unsur *floating* lebih dominan dibandingkan ketidakpastian manajemen. Artinya, peran Bank Indonesia dalam melakukan intervensi pada pasar uang lebih sedikit dibandingkan pergerakan kurs yang ditentukan oleh pasar uang itu sendiri. Pemilihan strategi ini dalam rangka menjaga daya saing produk ekspor melalui pergerakan mata uang dalam kisaran sempit.
 - c. *Managed Floating* dengan *Crawling Band Sistem* (September 1992- Agustus 1997), terjadi depresiasi nilai tukar yang kisarannya antara Rp2.053,40 hingga Rp2.791,30. Pada periode ini unsur *floating* semakin diperlakukan dengan kisaran yang semakin lebar. Pada 1 September 1992, Bank Indonesia menetapkan rentang intervensi Rp10 dengan batas bawah Rp2.035 dan batas atas Rp2.045. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1997 (akhir periode), Bank Indonesia akhirnya memperlebar rentang intervensi menjadi Rp304 dengan batas bawah Rp2.378 dan batas atas Rp2.682. Dengan demikian Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan pelebaran *band intervention* secara bertahap dan akhirnya *band intervension* dihapus sehingga rupiah lebih *floating* dibandingkan periode sebelumnya.
4. *Sistem Mengambang Bebas (Free Floating Exchange Rate System)*

Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Dalam sistem ini Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta

asing karena semata-mata untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Awalnya, penerapan sistem nilai tukar mengambang ini menyebabkan terjadinya gejolak yang berlebihan (*overshooting*). Misalnya kurs pada tangga 14 Agustus melemah tajam menjadi Rp2.800 per dolar dari posisi Rp2.650 per dolar pada penutupan hari sebelumnya. Banyak faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus merosot, mulai dari aksi ambil untung (*profit taking*) oleh pelaku pasar, tingginya permintaan perusahaan domestik terhadap dolar untuk pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo, memburuknya perkembangan perbankan nasional, maupun oleh sebab-sebab lain.

Dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut, pada bulan November 1997, *International Monetary Fund* (IMF) masuk ke Indonesia. Dengan kondisi dalam negeri yang bergejolak, terutama situasi sosial politik, program pemulihan ekonomi yang dilakukan bersama-sama dengan IMF tidak dengan segera membuahkan hasil. Sampai akhir Desember 1997, nilai tukar rupiah ditutup pada kisaran Rp5.000 per dolar, tetapi pergerakan nilai tukar rupiah semakin tak terkendali hingga mencapai puncaknya pada 22 Januari 1998 dimana kurs mencapai Rp16.000 per dolar.

2.1.4. Suku Bunga

2.1.4.1. Pengertian Suku Bunga

Tingkat bunga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan. Samuelson dan Nordhaus (1992:197) mendefinisikan suku bunga sebagai “pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang”. Ahli ekonomi

menyebutkan tingkat bunga yang dibayar kepada nasabah sebagai tingkat bunga nominal (*nominal interest rate*), dan kenaikan daya beli sesungguhnya dengan tingkat bunga riil. Tingkat bunga riil adalah perbedaan antara tingkat bunga nominal setelah dikurangi tingkat inflasi (mankiw, 2003:86).

Jika Tn.A memegang uang dan hanya disimpan di dalam dompet saja, maka Tn.A tidak dapat memperoleh bunga. Dengan kata lain, tingkat suku bunga adalah biaya memegang uang. Misalkan Tn.A mendepositokan atau menabungkan uang di bank, maka Tn.A akan mendapat bunga, dan tingkat bunga ini disebut tingkat bunga nominal (*nominal interest rate*). Namun, bila Tn.A lebih suka memegang uang kas berarti Tn.A tidak mendapat bunga, dan biaya memegang uang ini sering disebut sebagai biaya oportunitas (*opportunity cost*) dari memegang uang. Jadi *opportunity cost* timbul karena orang lebih suka memegang uang kas daripada mendepositokan uangnya di bank (Prasetyo, 2009:108).

Menurut Kaum Klasik, tingkat bunga itu terbentuk dari hasil interaksi antara tabungan (S) dan investasi (I). Sedangkan Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang (ditentukan di pasar uang) (Nopirin, 2011:90).

Tabungan menurut kaum klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Jadi, pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, keinginan masyarakat untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Hal ini disebabkan

karena pengusaha baru akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar daripada tingkat bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*). Jadi semakin rendah tingkat bunga, pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil (Nopirin, 2011:71).

2.1.3.5. Suku bunga riil vs nominal

Suku bunga nominal adalah suku bunga uang dalam nilai uang. Suku bunga nominal memberikan pengembalian sejumlah rupiah untuk satu rupiah investasi. Sedangkan suku bunga riil didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Misalkan suku bunga nominal adalah 10% dan laju inflasi adalah 3%, maka suku bunga riil yaitu $10-3=7\%$.

Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang tidak memperhitungkan nilai inflasi. Tingkat suku bunga riil adalah tingkat suku bunga yang memperhitungkan inflasi, sehingga perhitungan tingkat suku bunga tersebut lebih mencerminkan *cost of borrowing* yang sebenarnya (Mishkin, 2007).

Tingkat suku bunga riil yang memperhitungkan ekspektasi perubahan tingkat harga disebut sebagai *ex ante real interest rate*. Sedangkan tingkat suku bunga riil yang memperhitungkan perubahan tingkat harga aktual disebut sebagai *ex post real interest rate*. Tingkat suku bunga riil, tingkat suku bunga dan inflasi dihubungkan oleh persamaan fisher (*fisher equation*) sebagai berikut:

$$i = i_r + \pi^e$$

$$i_r = i - \pi^e$$

Pada saat tingkat suku bunga riil rendah, maka *borrowing cost* juga menjadi rendah, sehingga insentif untuk meminjam lebih besar jika dibandingkan dengan insentif untuk memberi pinjaman.

2.1.5. Teori *Gross Domestic Product* (GDP)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan (Mankiw, 2006: 7-10)

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Mankiw, 2006: 11)

PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran, dan struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, PDB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit

merupakan rasio antara PDB menurut harga berlaku dan PDB menurut harga konstan.

Menurut Mankiw (Perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan tahunan). 17 lapangan usaha, yaitu: (a) pertanian, kehutanan dan perikanan, (b) pertambangan dan penggalan, (c) industri pengolahan, (d) pengadaan listrik, (e) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (f) konstruksi, (g) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (h) transportasi dan pergudangan, (i) penyediaan akomodasi dan makan minum, (j) informasi dan komunikasi, (k) jasa keuangan dan asuransi, (l) real estate, (m) Jasa Perusahaan, (n) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (o) jasa pendidikan, (p) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (q) jasa lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

(a). Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (b). Pengeluaran Konsumsi LNPR (c). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (d) Pembentukan modal tetap domestik bruto (e). Perubahan inventori, (f) Ekspor Barang dan Jasa (g) Impor barang dan jasa.

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Indeks implisit PDB merupakan rasio antara PDB harga Berlaku dengan PDB harga konstan. Deflator PDB adalah laju pertumbuhan indeks implisit PDB. Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Inflasi di Indonesia. Beberapa penelitian tersebut dapat dilihat dari tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1	Muhammad Alfan (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Periode 2005-2014 Dengan Pendekatan Error Correction Model	1. Inflasi 2. Kurs 3. PDB	1. Jumlah Uang Beredar 2. Harga Minyak	- Perubahan kurs positif signifikan terhadap perubahan tingkat inflasi di indonesia. - Jumlah PDB berpengaruh positif signifikan terhadap	ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, 18(2), 23. https://doi.org/10.55886/esensi.v18i2.86

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
					tingkat inflasi di Indonesia.	
2	Astutik Komariyah (2016)	Analisis pengaruh jumlah uang beredar (JUB), kurs, dan suku bunga terhadap laju inflasi di Indonesia tahun 1999-2014	1. Inflasi 2. Kurs 3. Suku Bunga	Jumlah Uang Beredar	- Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia - Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia	e-Journal UMS Vol. 7 No. 89
3	Kurniawan Saputra (2013)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia 2007-2012	1. Inflasi 2. Kurs 3. Suku Bunga	Jumlah Uang Bereda	- Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. - Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. - Suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi inflasi di Indonesia.	e-journal universitas Diponegoro Vol 1 Tahun 2023
4	Yuliarni Yunus (2013)	Analisis faktor-faktor Yang yang mempengaruhi inflasi di Indonesia tahun 1998-2012	1. Inflasi 2. Subsidi BBM 3. Suku Bunga	1. Uang Beredar (JUB) 2. Harga Minyak Dunia	- Subsidi BBM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia - Tingkat suku bunga riil berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia	Jurnal Universitas Hasanuddin Vol IX No. 2 Tahun 2013
5	Rio Maggi dan Briggita Dian Saraswati	Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di	1. Inflasi 2. Suku Bunga	1. Uang Beredar 2. Harga Minyak	- Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan	Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Volume 6 No.

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
	(2013)	Indonesia; <i>Model demand pull inflation</i>		Dunia	dalam jangka pendek maupun jangka panjang.	22
6	Agung Prayogi (2022)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Menggunakan Metode OLS	1. Inflasi 2. Suku Bunga 3. PDB	Jumlah Uang Beredar	- PDB menunjukkan positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia - Suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap inflasi di Indonesia secara signifikan	Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Vol 1, No 2 (2022) p-ISSN 2621-3842 e-ISSN 2716-2443
7	Fitri Amaliyah (2022)	Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia	1. Inflasi 2. Kurs	Jumlah Uang Beredar	- Jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia - Kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 2, April 2022
8	Adrian Sutawijaya (2012)	Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia	1. Inflasi 2. Suku Bunga 3. Kurs	Investasi	- Suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia - Kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia	Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 8(2), 85–101.
9	Beureukat (2022)	Pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia	1. Inflasi 2. Suku Bunga	1. Kurs 2. Subsidi BBM 3. Suku Bunga 4. GDP	- Suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia	Oikonomia Jurnal Manajemen Vol. 16 No. 1 Januari 2022
10	Ningsih (2018)	Analisis Pengaruh Jumlah Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap	1. Inflasi 2. Kurs 3. Suku Bunga	1. GDP 2. Subsidi BBM	- Suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia	Vol 20, No 2 (2018): Jurnal Manajemen Daya Saing

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
		Inflasi Di Indonesia Periode 2014-2016			- Kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia	
11	Sarbaini (2021)	Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Laju Inflasi di Indonesia	1. Inflasi 2. Subsidi BBM	1. Kurs 2. Suku Bunga 3. GDP	- Subsidi BBM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi. Hal ini karena kenaikan subsidi pemerintah berdampak pada inflasi, karena ketika subsidi BBM pemerintah rendah, harga BBM naik	TMIT, vol. 2, no. I, pp. 25–32, Mar. 2022
12	Harun Arrasyid	Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia	1. Inflasi 2. Subsidi BBM	1. Kurs 2. Suku Bunga 3. GDP	Perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Desember 2013 Volume 11, No.2 hal: 78 - 90
13	Novita and Herianingrum (2020)	Pengaruh GDP, Ekspor dan Investasi Terhadap Inflasi di Lima Negara Anggota IDB	1. Inflasi 2. GDP	1. Ekspor 2. Investasi	- Hubungan antara DGP dan inflasi positif, artinya bila GDP naik maka inflasi juga naik. - Terdapat pengaruh GDP terhadap inflasi	Internasional Jurnal Ekonomi/ Volume XXV, No. 01 Maret 2020: 81-98
14	Octaviani Sitohang (2016)	Pengaruh GDP, Nilai Tukar Dan Suku Bunga SBI Terhadap Inflasi di Indonesia	1. Inflasi 2. GDP 3. Kurs 4. Suku Bunga	1. Subsidi BBM	- GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, - Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS berpengaruh positif dan signifikan	Internasional Jurnal Ekonomi/ Volume XI, No. 01 September 2016: 100-108

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
					terhadap inflasi, - Suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia	
15	Meita Nova Yanti Panjaitan (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia	1. Inflasi 2. Kurs 3. Suku Bunga	1. Subsidi BBM 2. Ekspor 3. GDP	- Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi - Suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi - Ekspor tidak berpengaruh terhadap inflasi	Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 21 No.3, Desember 2016

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Hubungan Antara Subsidi BBM dengan Inflasi di Indonesia

Subsidi BBM yang tidak tepat akan merugikan pemerintah itu sendiri sehingga pemerintah hanya menia-siakan anggaran belanja saja. Subsidi BBM yang harusnya bisa di nikmati oleh kalangan masyarakat kelas kebawah atau ekonomi kecil tapi dalam kenyataannya belum tentu semua masyarakat kelas kebawah atau ekonomi kecil merasakan, kebanyakan yang menikmati subsidi itu sendiri masyarakat ekonomi menengah keatas.

Subsidi BBM mempunyai hubungan positif dengan inflasi. Hal ini disebabkan ketika subsidi BBM yang diberikan pemerintah kecil akan ini menyebabkan harga BBM naik dan masyarakat kesulitan untuk membeli BBM dengan harga yang tinggi, hal inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Sebaliknya yang menyebabkan tidak timbulnya inflasi ketika pemerintah

menaikkan jumlah subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat. Harga BBM akan relatif murah sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk membeli BBM tersebut. Namun sekarang ini, banyak subsidi BBM yang diberikan pemerintah dimanfaatkan oleh mereka masyarakat yang mampu, sehingga subsidi tersebut jatuh tidak merata kepada masyarakat yang kurang mampu tersebut menyebabkan masyarakat kurang mampu semakin kesulitan dan yang mampu merasa senang.

2.2.2. Hubungan Antara Kurs dengan Inflasi di Indonesia

Saputra (2013) menunjukkan bahwa kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Jika kurs terdepresiasi hal ini akan berakibat pada biaya bahan baku impor yang meningkat. Jika hal itu terjadi akan berakibat pada langkanya barang-barang sehingga harga barang maupun jasa domestic akan meningkat dan inflasi juga akan mengalami kenaikan. Dalam sisi penawaran, jika terjadi depresiasi akan berakibat pada meningkatnya barang dari luar negeri dari harga dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang dalam negeri baik dari permintaan domestic maupun dari permintaan luar negeri terhadap barang ekspor. Keadaan ini kemudian memicu kenaikan harga sehingga inflasi akan naik.

2.2.3. Hubungan Antara Suku Bunga dengan Inflasi di Indonesia

Tingkat suku bunga merupakan harga atas dari penggunaan uang dalam bentuk persen. Teori suku bunga Keynes menyatakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh adanya permintaan dan penawaran akan uang. Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga kapital, dimana jika terjadi peningkatan permintaan uang maka akan meningkatkan suku bunga. Tingkat suku bunga

memiliki hubungan dengan tingkat inflasi yang dapat dijelaskan melalui persamaan Irving Fisher (Fisher equation) yaitu $i = r + \pi$.

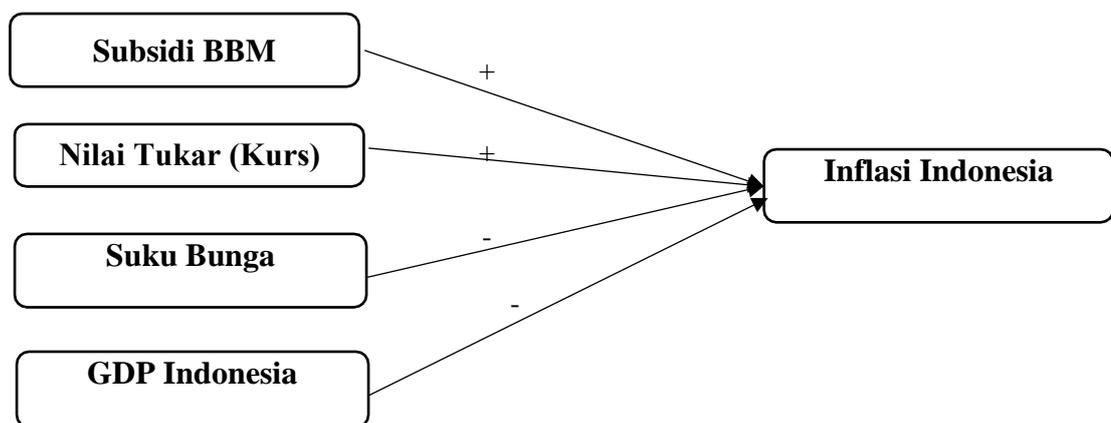
Teori kuantitas menyatakan bahwa kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 1 persen, dan kenaikan 1 persen tingkat inflasi dapat menyebabkan kenaikan suku bunga nominal sebesar 1 persen. Dari pernyataan dan teori diatas dapat disimpulkan jika suku bunga memiliki hubungan negatif terhadap inflasi.

Menurut Sunariyah (2004) suku bunga merupakan bunga tahunan yang dibayarkan dari suatu pinjaman yang berbentuk persentase, diperoleh dari jumlah bunga tiap tahun dibagi jumlah pinjaman. Suku bunga adalah harga dari suatu pinjaman. Hubungan antara suku bunga dengan inflasi menurut Baroroh dalam Amrini, Aimon, dan Sofyan (2014) yaitu, kenaikan suku bunga dalam jangka pendek pada pasar uang di dorong oleh adanya kenaikan suku bunga SBI. Kenaikan tersebut juga terjadi pada suku bunga dalam jangka panjang, respon yang diberikan oleh produsen dengan adanya kenaikan suku bunga ini melalui pengurangan tingkat investasi. Adanya pengurangan tingkat investasi menyebabkan produksi domestik mengalami penurunan, yang pada akhirnya juga akan menurunkan inflasi.

2.2.4. Hubungan Antara *Gross Domestic Product* (GDP) dengan Inflasi di Indonesia

Gross Domestic Product (GDP) berpengaruh negatif terhadap Inflasi sebagaimana dijelaskan penyebab inflasi dari sisi tarikan permintaan (*demand pull inflation*). Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada

kemakmuran individu dan masyarakat. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut Sukirno (2002:339), biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Singkatnya perkembangan *Gross Domestic Product* (GDP) sangat ditentukan oleh harga. Berbicara harga yang berlaku tentu tidak lepas dari kondisi inflasi. Artinya jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan, dan itu berarti GDP akan turun.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Faktor-Faktor Inflasi di Indonesia

2.3 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Diduga secara parsial subsidi BBM dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia tahun 2000-2022, sedangkan secara parsial suku bunga dan GDP Indonesia diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat inflasi di Indonesia Tahun 2000-2022.
- b. Diduga secara Bersama-sama subsidi BBM, kurs, suku bunga, nilai tukar dan GDP Indonesia berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia tahun 2000-2022.